

**PERAN DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI *INTER-
PARLIAMENTARY UNION (IPU)* DALAM RESOLUSI KONFLIK RUSIA-
UKRAINA TAHUN 2022-2024**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



Oleh:
IRFAN MAKARIM RIVANI
2010852038

Dosen Pembimbing:

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Kondisi geopolitik Rusia-Ukraina telah mengakibatkan dampak terhadap sistem internasional. Operasi khusus yang dilakukan Putin terhadap Ukraina mengundang kecaman karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan *territorial integrity*. Banyak aktor internasional yang berupaya untuk mendorong konflik yang salah satunya melalui lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut terkait peran diplomasi parlemen khususnya Indonesia melalui DPR RI dalam mendorong resolusi konflik Rusia-Ukraina di IPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan suatu fenomena secara analitis. Setelah itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk memverifikasi hasil dari *library research* yang dilakukan. Diplomasi parlemen yang menggunakan unsur *parliament to parliament* berdasarkan aspirasi rakyat, membuat upaya resolusi melalui diplomasi ini lebih fleksibel dan strategis untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep diplomasi parlemen yang didominasi oleh peran retorik yang diupayakan untuk mempromosikan resolusi konflik melalui dialog dan pendelegasian parlemen yang berkelanjutan. DPR RI memaksimalkan potensi diplomasi parlemen dengan wadah di IPU secara kolaboratif. Kesempatan diskusi di berbagai forum terus diupayakan dan IPU bersama dengan negara inisiator resolusi menghasilkan gugus tugas untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina yaitu *IPU Task Force*. Indonesia sebagai inisiator sekaligus anggota gugus tugas telah mengindikasikan bahwa Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan internasional dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif tanpa adanya keberpihakan ke salah satu pihak. Di akhir penelitian ini, DPR RI kembali menegaskan bahwa diplomasi parlemen sejalan dengan diplomasi pemerintah yang mana menjunjung tinggi penegakan *UN Charter*, hukum internasional, hak asasi manusia, dan *territorial integrity*.

Kata Kunci: Parlemen, IPU, Diplomasi, Resolusi, Konflik,



ABSTRACT

Geopolitical conditions in Russia-Ukraine have led to effects the international system. Putin's special operations against Ukraine draw criticism as they relate to human rights and territorial integrity. International actors have attempted to encourage conflict, namely legislative. This research aims to further discuss the role of parliamentary diplomacy, especially Indonesia through DPR RI in encouraging its resolution regarding Russia-Ukraine conflict at the IPU. This research uses a qualitative method by analytically describing a phenomenon. Then, this paper utilises an interview method to verify the results of the library research. Parliamentary diplomacy that uses parliament to parliament elements based on the people's aspirations, makes resolution in diplomacy more flexible and strategic. This research uses a conceptual framework of parliamentary diplomacy dominated by rhetorical diplomacy role that seek to promote conflict resolution through continuous dialogue and delegation. DPR RI maximises the potential of parliamentary diplomacy with IPU in a collaborative manner. Discussion opportunities in forums continue to be pursued and the IPU together with the initiator countries produced a task force for the resolution of the Russia-Ukraine conflict, namely the IPU Task Force. Indonesia as an initiator as well as a member of the task force has indicated that Indonesia has succeeded in gaining international trust with a free and active foreign policy without favouring one party. At the end of this study, DPR RI reaffirmed that parliamentary diplomacy is in line with government diplomacy which upholds the UN Charter, international law, human rights, and territorial integrity.

Keywords: *Parliament, IPU, Diplomacy, Resolution, Conflict.*

